

Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966) dan Relevansi Hubungan Diplomatik di Era Global

Ananda Putri Salsa Bella^{1*} dan Waode Yeny Nurhidayati¹

¹Universitas Negeri Malang

*ananda.putri.2407318@students.um.ac.id

Abstract

The Indonesia-Malaysia Confrontation, which took place between 1963 and 1966, is one of the significant events in the history of international relations in Southeast Asia. This conflict was triggered by tensions surrounding the formation of the Federation of Malaysia, which Indonesia regarded as a threat to the political stability and security of the region. This study aims to analyze the dynamics of the confrontation, identify its primary causes, and assess its impact on the diplomatic relations between the two countries. The methodology used in this research includes literature review and analysis of historical documents from the relevant period. The findings indicate that although the confrontation ended with the normalization of relations in 1966, its effects have continued to influence Indonesia and Malaysia's foreign policies and political interactions in the long term. The relevance of bilateral relations between the two countries in the global era is reflected in the importance of collaboration to maintain regional stability and active participation in various international forums. In the global context, constructive and mutually supportive bilateral relations are key to addressing shared challenges such as climate change, free trade, and regional security issues. In conclusion, the Indonesia-Malaysia Confrontation provides valuable lessons on diplomacy, managing differences, and the importance of international cooperation in an increasingly interconnected world.

Keywords: Confrontation; diplomacy; international relations; Cold War.

Abstrak

Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlangsung sekitar tahun 1963 hingga 1966 merupakan salah satu peristiwa signifikan dalam sejarah hubungan internasional Asia Tenggara. Konflik ini dipicu oleh ketegangan terkait pembentukan Federasi Malaysia, yang dianggap oleh Indonesia sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konfrontasi tersebut, mengidentifikasi penyebab utamanya, serta menilai dampaknya terhadap hubungan diplomatik kedua negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis dokumen sejarah terkait periode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konfrontasi berakhir dengan normalisasi hubungan pada tahun 1966, dampaknya tetap mempengaruhi kebijakan luar negeri dan interaksi politik Indonesia dan Malaysia dalam jangka panjang. Relevansi hubungan diplomatik kedua negara di era global tercermin dalam pentingnya kolaborasi untuk menjaga stabilitas kawasan serta berperan aktif dalam berbagai forum internasional. Dalam konteks global, hubungan bilateral yang konstruktif dan saling mendukung menjadi kunci dalam menghadapi tantangan bersama seperti perubahan iklim, perdagangan bebas, dan isu-isu keamanan regional. Kesimpulannya, konfrontasi Indonesia-Malaysia memberikan pelajaran penting tentang diplomasi, pengelolaan perbedaan, dan pentingnya kerjasama internasional di dunia yang semakin modern.

Kata Kunci: Konfrontasi; diplomasi; hubungan internasional; Perang Dingin.

Pendahuluan

Sejarah panjang mengenai hubungan antara dua negara seringkali dituliskan secara dinamis. Hal ini erat kaitannya dengan hakikat kajian sejarah yang selalu bersifat dinamis yaitu terus berkembang sesuai perkembangan zaman (Hutauruk, 2018). Hubungan dua negara dapat dilihat dari kedekatan wilayah diantara keduanya seperti Indonesia dan Malaysia, dimana terjalinnya kedekatan berlangsung secara eksklusif karena keduanya memiliki rumpun yang serupa, latar belakang sejarah yang sama, termasuk kesamaan bahasa, kebudayaan dan agama (Ab Ghani et al., 2021). Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia dimulai pada tahun 1957 setelah keduanya berhasil keluar dari belenggu penjajahan dan berdiri menjadi negara yang merdeka (Maksum & Bustami, 2014). Kedua negara ini berpeluang membangun kerjasama yang baik atau bahkan mudah mengalami konflik karena pada dasarnya setiap hubungan bilateral tentunya mengalami pasang surut di berbagai sektor kehidupan, biasanya faktor utama yang melatarbelakangi surutnya hubungan adalah perbedaan dan perselisihan perspektif antara satu dengan yang lainnya.

Di awal hubungan diplomatiknya kedua negara ini seringkali mengalami perselisihan, seperti pasca perang dingin terjadi perbedaan idealisme. Dari pihak Indonesia yaitu Presiden Soekarno lebih condong ke Blok Timur sedangkan Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman lebih condong ke Blok Barat. Konflik terus berlanjut hingga sidang Dewan keamanan PBB pada September 1957 mengenai permasalahan Irian Barat, Malaysia justru bersikap netral tanpa membela Indonesia. Hal ini membuat hubungan keduanya semakin memanas dan memunculkan ketegangan politik terlebih Presiden Soekarno yang kecewa terhadap sikap Tengku Abdul Rahman (Maksum & Bustami, 2014). Puncak dari perselisihan antara keduanya terjadi di tahun 1963 yang disebabkan pembentukan Negara Federasi Malaysia yang menggabungkan negara Malaysia, Singapura, Serawak dan Sabah menjadi kesatuan. Presiden Soekarno menentang pembentukan federasi ini karena berpandangan bahwa hal ini hanya rekayasa Blok Barat untuk memperkuat dominasinya di kawasan Asia Tenggara, selain itu hal ini bersifat neo-kolonialisme (penjajahan baru) yang dapat mengancam eksistensi Indonesia (Saefudin, 2017).

Konflik terus berlanjut karena berbagai jalan yang ditempuh untuk menentang pembentukan federasi ini selalu menemui jalan buntu. Menyikapi hal tersebut Presiden Soekarno membangkitkan semangat konfrontasi melalui Soebandrio pada Januari 1963 kemudian memunculkan slogan baru yaitu Ganyang Malaysia untuk semakin membarakan semangat konfrontasi karena Indonesia menolak segala bentuk kolonialisme dan imperialisme (Darmawansyah et al., 2023). Tengku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri Malaysia tidak mengindahkan hasil dari pertemuannya dengan Presiden Soekarno di Tokyo pada 1 Juni 1963. Secara tidak langsung pihak Malaysia telah melakukan penghinaan terhadap kedaulatan Indonesia karena di London secara sadar beliau menandatangani dokumen persetujuan dengan Inggris berkaitan tentang pembentukan Negara Federasi Malaysia pada 31 Agustus 1963.

Tepat pada 17 September 1963 Indonesia memutuskan hubungannya dengan Malaysia yang berbuntut pada munculnya sentimen anti-Indonesia oleh masyarakat Malaysia, mereka bahkan tidak segan menginjak-injak lambang negara Indonesia. Hal ini semakin memantik kemarahan Presiden Soekarno hingga melancarkan serangan yang dikenal sebagai DWIKORA (Dwi Komando Rakyat) pada 3 Mei 1964 untuk mencegah pembentukan Federasi Malaysia dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Konflik

antara Indonesia dan Malaysia akhirnya mulai mereda akibat peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang ditandai dengan kudeta berdarah yaitu G-30S/PKI, selain itu naiknya Soeharto ke kursi kepemimpinan membawa Indonesia dan Malaysia menuju perdamaian karena Soeharto mengakhiri konfrontasi dan kembali memperbaiki hubungan dengan Malaysia (Ricklefs, 2005).

Pasca konfrontasi selama beberapa tahun terakhir membuat Indonesia dan Malaysia kembali memulai lembaran baru. Keduanya saling mengusahakan untuk memperbaiki hubungan, berbagai pertemuan diselenggarakan dan kedua negara menyepakati bahwa tidak akan memihak kekuasaan manapun, Indonesia memperkuat politik bebas aktifnya dan Malaysia akan bersikap netral. Hubungan mereka semakin membaik melalui ASEAN yang menekankan kerjasama di berbagai bidang yaitu politik, ekonomi, dan keamanan. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB pada 19 September 1966 disambut baik oleh Malaysia (Ibrahim, 2022). Proses rekonsiliasi diwarnai dengan kerjasama kedua negara dan tidak dapat dipungkiri bahwa peran tokoh seperti Soeharto dan Tengku Abdul Razak mampu menciptakan hubungan yang baik, keduanya memiliki kesamaan dalam hal stabilitas kawasan. Di tahun-tahun ini kedekatan yang terjalin di antara dua negara ini semakin erat dengan perspektif yang sama yaitu mendukung kenetralan sebagai bentuk memelihara stabilitas dalam negeri dari pengaruh komunisme (Sunarti, 2014).

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia mengalami dinamika yang naik turun hingga saat ini, pada beberapa dekade terakhir keduanya juga mengalami konflik yang dirasa cukup serius. Dengan dasar latar belakang sejarah yang sama, Malaysia berusaha mengklaim beberapa warisan budaya milik Indonesia seperti batik, rendang, Reog Ponorogo, Angklung, Tari Pendet, Kuda Lumping dan sebagainya. Tentunya hal ini menimbulkan polemik terutama bagi masyarakat pada masing-masing negara yang berusaha saling membenarkan bahwa warisan budaya tersebut milik dari negaranya. Tidak hanya itu ketegangan antar negara ini juga dipengaruhi oleh konflik mengenai perbatasan yang terjadi di wilayah perairan Ambalat, Ligitan dan Sipadan dan wilayah darat yaitu Pulau Sebatik (Janice et al., 2021). Pada kenyataannya dua negara yang bertetangga ini secara dinamis memiliki hubungan yang pasang surut terutama pasca konfrontasi hingga saat ini. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengkaji relevansi hubungan diplomatik yang terjalin antara dua negara tersebut pada era global dengan berkaca pada sejarah kalam konfrontasi Indonesia-Malaysia. Diharapkan tulisan ini dapat membuka cakrawala pengetahuan mengenai hubungan diplomatik yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen sejarah untuk mengeksplorasi dinamika Konfrontasi Indonesia-Malaysia antara tahun 1963 hingga 1966 serta dampaknya terhadap hubungan diplomatik kedua negara di era global. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan resmi pemerintah, dan karya ilmiah yang membahas konfrontasi dari berbagai perspektif, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Literatur yang dikaji memberikan wawasan mengenai penyebab, perkembangan, dan akibat konfrontasi ini dalam konteks geopolitik Asia Tenggara, serta pengaruhnya terhadap hubungan diplomatik jangka panjang antara Indonesia dan Malaysia.

Selain itu, peneliti juga melakukan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen arsip yang berasal dari periode 1963 hingga 1966. Dokumen ini meliputi surat-surat diplomatik, pernyataan resmi, dan catatan internasional yang terkait dengan konfrontasi tersebut, yang memberikan pemahaman lebih dalam mengenai kebijakan luar negeri kedua negara pada masa itu. Dengan mengkaji sumber-sumber ini, peneliti dapat mengungkap bagaimana diplomasi dijalankan selama konfrontasi dan bagaimana kedua negara merespons berbagai dinamika politik yang terjadi. Metode penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis kritis untuk mengevaluasi dampak jangka panjang konfrontasi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia. Pendekatan kritis ini tidak hanya bertujuan untuk memahami sebab-sebab dan akibat langsung dari konfrontasi, tetapi juga untuk menggali elemen-elemen yang masih mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara hingga saat ini. Penelitian ini juga membandingkan konfrontasi dengan peristiwa diplomatik lain di kawasan Asia Tenggara, serta melihatnya dalam konteks global yang lebih luas, termasuk pengaruh Perang Dingin terhadap kebijakan luar negeri negara-negara di kawasan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Konfrontasi Indonesia-Malaysia, yang terjadi pada pertengahan abad ke-20 menjadi salah satu babak paling dramatis dalam sejarah Asia Tenggara. Dalam hal ini kedua negara serumpun ini terlibat dalam ketegangan politik akibat perbedaan ideologi yang akhirnya mengguncang hubungan yang terjalin dengan sangat baik. Selama tiga tahun konflik terus berkecamuk hingga mengakibatkan keretakan hubungan dua negara. Konfrontasi ini diawali dengan latar belakang dua pemimpin masing-masing negara yang memiliki perbedaan pandangan mengenai kecenderungan pada dua blok yang terlibat dalam perang dingin. Malaysia menunjukkan keterbukaannya mengenai dukungannya terhadap Blok Barat dengan menjadi anggota Five Power Defence Arrangements (FPDA) dengan Singapura, Australia, dan New Zealand pada tahun 1971. Di sisi lain Indonesia memiliki kecenderungan pada Blok Timur dengan menutup akses bagi Blok Barat untuk ikut campur tangan dengan urusan negaranya (Yaakub, 2013). Kecenderungan Soekarno terhadap Blok Timur dapat dilihat melalui kedekatannya dengan PKI sehingga membuat beliau memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara Blok Timur seperti Uni Soviet, RRC, Korea Utara, dan Vietnam.

Perbedaan pandangan antara Indonesia dan Malaysia bukan menjadi faktor utama yang menyebabkan konfrontasi namun lebih dari itu keputusan yang diambil Malaysia untuk membentuk Negara Federasi Malaysia melukai harga diri Presiden Soekarno yang saat itu menggaungkan semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Soekarno menilai bahwa pembentukan Negara Federasi Malaysia (Brunei, Sarawak, Sabah, dan Singapura) merupakan suatu bentuk neo-kolonialisme atau penjajahan baru karena Malaysia memfasilitasi Inggris yang pernah menancapkan kekuasaannya di negaranya sendiri (Samsul, 2023). Pada Januari 1963 Soebandrio sebagai Menteri Luar Negeri dengan segera menyuarakan kebijakan konfrontasi untuk mempertahankan Sarawak dan Sabah (Nur & Ravico, 2021). Berbagai strategi pencegahan pembentukan Negara Federasi Malaysia berujung nihil, pertemuan yang dilakukan antara Presiden Soekarno dan PM Tengku Abdul Rahman di Tokyo pada 31 Mei 1963 tidak menemukan kesepakatan justru Malaysia mengingkarinya dengan menandatangani dokumen deklarasi Negara Federasi Malaysia.

Tepat pada 16 September 1963 Federasi Malaysia memproklamkan pembentukannya sehingga membuat Indonesia segera menyerukan semangat ganyang Malaysia. Konfrontasi ini bermula dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan

Malaysia serta konfrontasi pada bidang ekonomi. Kebijakan ini dijalankan untuk memberikan keuntungan di bidang ekspor Indonesia tanpa melalui Malaysia dan Singapura. Berbagai media massa seperti surat kabar nasional Suluh Indonesia membantu menyuarakan ganyang Malaysia sebagai alat politik untuk mendukung berlangsungnya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia (Habiastuti, 2016). Tidak sampai di situ Presiden Soekarno juga membentuk gerakan sukarela sebagai operasi pengamanan konfrontasi. Dilanjutkan dengan pembentukan DWIKORA pada 3 Mei 1964 dengan tujuan memperkuat pertahanan Indonesia, pemerintah menyiapkan pasukan militer darat, laut dan udara di wilayah perbatasan (Sibuea et al., 2020). Konfrontasi berlangsung hingga tahun-tahun berikutnya dengan melewati berbagai perundingan hingga konfrontasi berhenti dengan sendirinya yang ditandai dengan Konferensi Bangkok pada 28 Mei 1966 dan dilanjutkan dengan Jakarta Accord pada 11 Agustus 1966.

Dinamika Konflik dan Peran Aktor Internasional

Hubungan Indonesia dan Malaysia mengalami dinamika yang cukup rumit, konflik-konflik yang terjadi selalu berkaitan dengan latar belakang kedekatan di antara dua negara tersebut. Konflik pertama yaitu perbedaan pandangan para pemimpin negara yang mengakibatkan kedua belah pihak saling berselisih paham. Apabila ditarik suatu benang merah, konflik-konflik yang muncul selalu melibatkan aktor-aktor internasional. Terkait konfrontasi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia menjadi suatu polemik bagi masyarakat luas, konfrontasi ini dinilai tidak rasional karena dianggap terjadi karena kepentingan dan ambisi Soekarno sebagai Presiden Indonesia yang berusaha menutupi kasus mengenai keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu yang kurang baik. Presiden Soekarno berusaha mencari musuh baru dengan melakukan ganyang Malaysia (Djafar, 2006). Sebagai orang pertama di Indonesia, Soekarno memiliki privilege untuk membuat keputusan mengenai kebijakan negara sehingga dapat dengan mudah memobilisasi apa yang diinginkan.

Dalam upaya normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia pasca konfrontasi tahun 1966, pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto memperbaiki tatanan negara dengan memulai kerjasama dengan PBB pada 19 September 1966 kemudian memperkuat hubungan diplomatiknya dengan Malaysia seperti turut serta dalam pembentukan ASEAN bersama Malaysia pada 8 Agustus 1967 (Yogatama et al., 2021). Kemudian pergantian kepemimpinan dari Tengku Abdul Rahman ke Tengku Abdul Razak memberikan pengaruh yang baik bagi pemulihan hubungan dengan menekankan dasar politik netral untuk menjalin kerjasama dengan semua negara tanpa memandang ideologi politik dan corak sosialnya. Peranan Adam Malik sebagai Menteri luar negeri Indonesia juga tidak kalah penting dalam usahanya memperbaiki hubungan diplomatik dengan Malaysia yang sempat putus di tengah jalan dengan melakukan pertemuan bersama Tengku Abdul Razak pada 11 Agustus 1966, selain itu membuat Indonesia kembali menjadi anggota PBB setelah sempat keluar pada 20 Januari 1965 karena protes terhadap PBB yang menetapkan Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kembalinya Indonesia menjadi anggota mendapatkan sambutan dan dukungan penuh dari Malaysia (Ibrahim, 2022). Hal ini tentunya membawa angin segar bagi hubungan kedua negara.

Di tahun-tahun pasca konfrontasi kedua negara memperbaiki kerjasama di berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial dan keamanan. Kedua negara ini berusaha menghindari pengaruh dari luar dan bersikap netral. Memasuki abad ke-21 sekitar tahun 2000-2005 kedua negara kembali terlibat konflik seperti masalah tenaga kerja ilegal di Malaysia yang didominasi dengan WNI dan isu perbatasan wilayah yaitu Ambalat yang diakui sebagai wilayah masing-masing kedua negara. Dalam hal ini

kepemimpinan di masa Abdurrahman Wahid, B.J Habibie, dan Megawati Soekarnoputri dianggap lemah jika dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Krisis kepemimpinan seperti ini mempengaruhi stabilitas hubungan Indonesia dan Malaysia sehingga segala proses pemulihan hubungan menjadi terkendala (Djafar, 2006).

Sebagai negara yang bertetangga dan memiliki kesamaan latar belakang budaya seringkali Indonesia dan Malaysia terlibat konflik klaim warisan budaya hingga saat ini. Klaim sepihak yang dilakukan Malaysia atas warisan budaya Indonesia memunculkan ketegangan di antara keduanya, warisan budaya milik Indonesia seperti batik, rendang, Reog Ponorogo, Angklung, Tari Pendet, Kuda Lumping dan sebagainya dipromosikan sebagai milik Malaysia. Sehingga hal ini memantik amarah Indonesia yang berujung pada pengajuan keberatan atas promosi pariwisata Malaysia diikuti dengan pemberitaan di berbagai media massa bahwa Malaysia telah mencuri warisan Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin pada saat itu juga turun tangan dengan menegur Malaysia bahwa hal tersebut tidak pantas dilakukan. Untuk itu UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) sebagai badan pelestarian warisan dunia memiliki peran penting dalam penanganan konflik klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia yakni menetapkan warisan budaya masing-masing negara secara paten (Hasanah, U., Magfirah, R., Setiawati, A., 2024).

Dampak Konfrontasi Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia

Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966) bukan hanya merupakan periode yang penuh dengan ketegangan politik dan militer, tetapi juga meninggalkan jejak yang dalam bagi hubungan bilateral kedua negara. Konflik ini muncul sebagai akibat dari perbedaan pandangan terhadap pembentukan Federasi Malaysia, yang dianggap oleh Indonesia sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan stabilitas kawasan. Ketegangan ini memperburuk hubungan yang telah terjalin, mengarah pada pertikaian terbuka antara dua negara yang dulunya memiliki hubungan erat, dan memengaruhi dinamika diplomatik jangka panjang (Chairudin Nur dan Ravico, 2021)

Secara langsung, konfrontasi menyebabkan kerusakan yang mendalam pada hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia. Ketika Indonesia merasa terancam oleh pembentukan Malaysia, terutama karena penggabungan wilayah Borneo, serangkaian kebijakan agresif, baik militer maupun diplomatik, dilancarkan oleh Indonesia untuk menggagalkan federasi tersebut. Indonesia melakukan operasi militer di wilayah Malaysia, yang tidak hanya memicu ketegangan diplomatik, tetapi juga memperburuk sentimen nasional di kedua negara. "Konfrontasi ini mengubah citra kedua negara, menjadikan masing-masing lebih berhati-hati dan skeptis terhadap niat satu sama lain, menciptakan keretakan yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat" (Harper TN, 1999).

Di sisi lain, meskipun konfrontasi berakhir dengan normalisasi hubungan pada tahun 1966, dampaknya jauh lebih dalam dan berlangsung lama. Rivalitas yang berkembang selama konfrontasi mempengaruhi kebijakan luar negeri kedua negara, yang masih mencerminkan ketegangan masa lalu (Perdana, 2015). Kritik terhadap hubungan bilateral yang pasca-konfrontasi ini juga mencakup kegagalan untuk sepenuhnya menanggulangi perbedaan ideologis yang tercipta. Normalisasi hubungan, meskipun penting, tidak sepenuhnya menghapus dampak dari sejarah yang penuh ketegangan itu. Dalam banyak hal, Indonesia dan Malaysia akhirnya berkomitmen pada kerjasama yang lebih konstruktif, tetap terbelenggu oleh pemikiran bahwa "keamanan nasional" masing-masing adalah sesuatu yang perlu dijaga melalui strategi masing-masing. Hal ini terlihat dalam kebijakan luar negeri kedua negara yang kadang saling bertentangan, meskipun mereka berkolaborasi dalam berbagai forum internasional, seperti ASEAN.

Namun demikian, dalam melihat hubungan kedua negara di era global, kita juga dapat melihat potensi positif yang muncul dari sejarah konfrontasi tersebut. Dalam jangka panjang, ketegangan masa lalu ini mendorong kedua negara untuk lebih berhati-hati dan strategis dalam membangun hubungan mereka. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia pada tahun 1966 dapat dilihat sebagai sebuah langkah penting dalam memperbaiki keretakan yang terjadi, dan membuka jalan untuk kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang (Kusmayadi, 2017). Walaupun terkadang ketegangan masih muncul, kedua negara mulai menyadari bahwa stabilitas kawasan Asia Tenggara, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, perdagangan bebas, dan keamanan regional, memerlukan kolaborasi yang lebih solid dan saling mendukung. Meskipun konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan babak kelam dalam hubungan bilateral kedua negara, dampaknya memberikan pelajaran penting tentang pentingnya diplomasi yang berbasis pada pengelolaan perbedaan, dan bagaimana sejarah dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri serta hubungan internasional. Konfrontasi ini mengajarkan bahwa hubungan antarnegara bukan hanya soal penyelesaian konflik, tetapi juga bagaimana membangun kembali kepercayaan dan kerjasama yang produktif di tengah perbedaan yang mendalam.

Relevansi Konfrontasi Indonesia-Malaysia Dalam Hubungan Diplomatik Di Era Global

Meskipun konfrontasi Indonesia-Malaysia berakhir pada tahun 1966 dengan perjanjian damai dan rekonsiliasi, dampaknya terus terasa hingga hari ini. Meskipun hubungan Indonesia dan Malaysia telah banyak berkembang, masih ada bayang-bayang ketegangan masa lalu yang kadang-kadang muncul kembali, terutama dalam hal sengketa perbatasan dan klaim wilayah. Misalnya, perdebatan mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang sempat mencuat pada awal abad ke-21 menggambarkan bagaimana warisan sejarah ini masih bisa mempengaruhi interaksi antara kedua negara, meskipun keduanya telah berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur diplomatik (Tristantri & Zahidi, 2024)

Dalam konteks ekonomi, hubungan Indonesia dan Malaysia memang sangat erat. Malaysia merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, dengan kedua negara saling mengandalkan satu sama lain dalam berbagai sektor seperti minyak kelapa sawit, industri, dan perdagangan. Namun, ketegangan sosial yang muncul akibat hubungan kerja migran, terutama tenaga kerja Indonesia di Malaysia, sering kali menciptakan ketegangan baru. Warga Indonesia yang bekerja di Malaysia kadang mengalami perlakuan buruk, yang memicu protes di dalam negeri dan merusak citra hubungan diplomatik kedua negara. Fenomena ini mencerminkan ambivalensi dalam hubungan kedua negara, meskipun secara ekonomi sangat saling bergantung, ketegangan sosial dan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja migran sering kali memicu ketegangan yang tak bisa dihindari.

Secara diplomatik, meskipun konfrontasi itu telah berlalu, warisan tersebut memberikan pembelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya komunikasi dan diplomasi yang efektif. Kedua negara kini terlibat dalam berbagai forum multilateral seperti ASEAN, PBB, dan lainnya, di mana mereka harus menghadapi tantangan global yang lebih besar. Namun, hubungan mereka tetap diwarnai dengan sejumlah perbedaan, baik dalam masalah teritorial maupun kepentingan politik internasional. Ketika menghadapi kekuatan besar seperti China atau Amerika Serikat, Indonesia dan Malaysia sering kali harus menyeimbangkan kepentingan nasional masing-masing, yang terkadang memunculkan ketegangan tersendiri (Heddy Shri Ahimsa-Putra, 2022)

Di sisi lain, konfrontasi ini juga menyentuh aspek identitas nasional. Pada masa lalu, di Indonesia, konfrontasi dengan Malaysia dipropagandakan sebagai perjuangan untuk

melawan imperialisme dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Sedangkan di Malaysia, nasionalisme Melayu yang dibangun pada masa pembentukan negara baru memperkuat identitas negara yang berdiri dengan kuat. Meskipun saat ini kedua negara lebih mengutamakan kerjasama dalam banyak bidang, sentimen nasionalisme ini kadang-kadang tetap muncul, mengingat masih adanya rasa persaingan dan ketegangan yang diwariskan dari masa lalu (Agus Mulyana, 2013).

Seiring berjalannya waktu, Indonesia dan Malaysia semakin terhubung dalam dunia yang semakin terglobalisasi. Keterkaitan ekonomi, budaya, dan politik semakin erat. Meskipun begitu, mereka tidak bisa lepas dari bayang-bayang sejarah konfrontasi yang masih memiliki dampak dalam pengelolaan hubungan diplomatik mereka. Hal ini mengajarkan pentingnya pendekatan yang lebih hati-hati dalam bernegosiasi dan berdiplomasi, serta bagaimana sejarah masa lalu tetap memberi warna terhadap cara kedua negara berinteraksi di panggung internasional (Irshanto, 2020). Meskipun konfrontasi Indonesia-Malaysia telah lama berakhir, dampaknya tetap terasa dalam hubungan diplomatik kedua negara hingga kini. Konflik yang terjadi pada masa lalu mengajarkan pentingnya penyelesaian damai, namun juga menunjukkan bahwa meskipun hubungan bilateral telah berkembang, sejarah tetap memainkan peran dalam memengaruhi cara kedua negara menyelesaikan masalah dan berinteraksi satu sama lain dalam konteks yang lebih luas.

Kesimpulan

Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966) merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah hubungan internasional di Asia Tenggara yang dipicu oleh perbedaan kepentingan politik dan ideologi antara kedua negara. Konflik ini berakar pada penolakan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia, yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme dan ancaman terhadap stabilitas kawasan. Meskipun konfrontasi ini berakhir dengan normalisasi hubungan pada tahun 1966, dampaknya tetap berlanjut dalam dinamika diplomatik kedua negara, khususnya dalam kebijakan luar negeri dan interaksi politik jangka panjang. Pasca-konfrontasi, Indonesia dan Malaysia berupaya membangun kembali hubungan bilateral melalui berbagai mekanisme diplomasi dan kerja sama regional, terutama dalam kerangka ASEAN. Namun, beberapa ketegangan masih terjadi, seperti perselisihan terkait klaim budaya, batas wilayah, dan permasalahan tenaga kerja. Dalam konteks globalisasi, hubungan diplomatik yang stabil dan konstruktif menjadi esensial bagi kedua negara untuk menghadapi tantangan bersama, seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, serta isu keamanan regional. Dengan demikian, konfrontasi Indonesia-Malaysia memberikan pelajaran penting mengenai signifikansi diplomasi dalam menyelesaikan konflik antarnegara, pengelolaan perbedaan politik, serta pentingnya kerja sama internasional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Sejarah konfrontasi ini menegaskan bahwa meskipun konflik dapat terjadi, rekonsiliasi dan kolaborasi tetap menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan bilateral yang harmonis dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ab Ghani, R. H., Abdul Hamid, A. S. bin, Paidi, Z. Bin, Saidon, M. K. bin, Hasan, H., Ahmad, K., & Latif, M. (2021). *Malaysia-Indonesia Bilateral Relations: Empirical Study on the Stage of Knowledge of Generation X and Y*

- Indonesia and Malaysia. *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)*, 10(1), 147. <https://doi.org/10.24252/jicsa.v10i1.22119>
- Agus Mulyana. (2013). *NASIONALISME DAN MILITERISME: IDEOLOGISASI HISTORIOGRAFI BUKU TEKS PELAJARAN SEJARAH SMA*. Paramita, 23.
- Chairudin Nur dan Ravico. (2021). *GANYANG MALAYSIA Studi Historis Politik Luar Negeri Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966*. *Danadyaksa Historica*, 25–33. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/JDH/index>
- Darmawansyah, A. F., Eltika, A., Seprina, R., Jambi, S. U., & Sejarah, K. (2023). *Kajian sejarah konfrontasi malaysia*. *SAJARATUN, Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah Vol. 9 No. 1 Juni 2023*, 9(1), 65–78.
- Djafar, Z. (2006). *Hubungan Indonesia-Malaysia: Memerlukan Perspektif dan Kebijakan Baru?* *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 3 N.
- Habiastuti, D. A. (2016). *Pemberitaan Media Cetak Nasional Tentang Kebijakan Ganyang Malaysia Diyah Ayu Habiastuti*. *Journal Pendidikan Sejarah*, 4(2), 415–426.
- Harper TN. (1999). *The End of Empire and the Making of Malaya*. Cambridge University Press.
- Heddy Shri Ahimsa-Putra. (2022). *HARSJA BACHTIAR DAN PEMBENTUKAN BANGSA INDONESIA (TEORI DAN HISTORIOGRAFI)*. *PATRAWIDYA*, 23 No. 1.
- Hasanah, U., Magfirah, R., Setiawati, A., & N. (2024). *Menelusuri Kontroversi Klaim Budaya Perspektif Indonesia-Malaysia dalam Sengketa Warisan Budaya*. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, Volume 5 N.
- Hutauruk, A. F. (2018). *Digital Citizenship: Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Sejarah Di Era Global*. *Historis | FKIP UMMat*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.31764/historis.v2i2.186>
- Ibrahim, M. A. (2022). *Peranan Tun Abdul Razak (Malaysia) Dan Adam Malik (Indonesia) Dalam Menamatkan Era Konfrontasi Malaysia-Indonesia*. *E-Bangi Journal of Social Science and Humanities*, 19(5), 224–245. <https://doi.org/10.17576/ebangi.2022.1905.15>
- Irshanto, A. (2020). *MATERI KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA 1963-1966 DALAM PERSPEKTIF BUKU TEKS PELAJARAN SEJARAH SMA DI INDONESIA DAN MALAYSIA*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Janice, C., Kurniawan, A. M., Lukito, T., Winola, L., Christina, C., & Arkan, A. A. (2021). *Pengaruh Border Trade Agreement (BTA) dan Border Crossing Agreement (BCA) sebagai Landasan Hubungan Diplomatik Indonesia-Malaysia*. *Jurnal Sentris*, 158–172.
- Kusmayadi, Y. (2017). *POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA PADA MASA KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA TAHUN 1963-1966*. *Jurnal Artefak*, 23–34.
- Maksum, A., & Bustami, R. (2014). *Ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia dalam isu tarian pendet*. *Kajian Malaysia*, 32(2), 41–72.
- Nur, C., & Ravico, R. (2021). *GANYANG MALAYSIA Studi Historis Politik Luar Negeri Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966*. *Danadyaksa Historica*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.32502/jdh.v1i1.3594>
- Perdana, I. (2015). *Indonesia-Malaysia Confrontation In 1963-1966 (The Economic Impacts on Society in Tanjung Balai Karimun)*. *Jurnal FKIP UNRI*.

- Ricklefs, M. . (2005). *Sejarah Indonesia Modern*. PT Serambi Ilmu Semesta.
- Saefudin, A. (2017). KONTRIBUSI USMAN JANATIN DALAM KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA, 1962-1966. *Jurnal Artefak: History and Education*, Vol.4 No.2.
- Samsul, K. O. (2023). Propaganda surat khabar Harian Rakjatsemasa konfrontasi Indonesia-Malaysia, 1963-1965. *History Journal of Merong Mahawangsa*.
- Sibuea, M. L., Bunari, B., & Fikri, A. (2020). Peranan Harun Bin Said Sebagai Tokoh Pejuang dalam Konfrontasi Indonesia Malaysia (1963-1968). *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 4(2), 91–104. <https://doi.org/10.29408/fhs.v4i2.3338>
- Sunarti, L. (2014). Politik Luar Negeri Malaysia terhadap Indonesia , 1957-1976 : Dari Konfrontasi Menuju Kerjasama. *Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 2(1), 65–80.
- Tristantri, C. N., & Zahidi, M. S. (2024). Kajian komparasi politik luar negeri Indonesia Malaysia di era pemerintahan soekarno dan soeharto, 1963-1966. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 14(2), 162. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v14i2.14794>
- Yaakub, A. N. (2013). *Dances with Garuda: Malaysia- Indonesia Bilateral Relations*. Univ. Malaysia Sarawak.
- Yogatama, R. D., Ramdhani, D., & Gunawan, R. P. T. (2021). Dinamika Politik Dan Hubungan Internasional Indonesia Di Masa Perubahan Dari Presidensial. *March*, 1–10. https://www.researchgate.net/profile/Regina-Gunawan/publication/350005778_DINAMIKA_POLITIK_DAN_HUBUNGAN_INTERNASIONAL_INDONESIA_DI_MASA_ORDE_BARU/links/604ae49e92851c1bd4e28484/DINAMIKA-POLITIK-DAN-HUBUNGAN-INTERNASIONAL-INDONESIA-DI-MASA-ORDE-BARU.pdf